



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**FORMULIR
PERMOHONAN BARU**

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 01 /PMK.01/2012
TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI
KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Di Jakarta

Perihal : **PERMOHONAN IZIN MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN
PAJAK**

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1).....
Tempat / tanggal lahir :(2).....
Pendidikan Terakhir :(3).....
Alamat Rumah :(4).....
Nomor Telepon/HP :(5).....
No. Kartu Tanda Penduduk :(6).....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :(7).....

Dengan ini mengajukan permohonan izin menjadi kuasa hukum pada
Pengadilan Pajak. Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya
lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Daftar Riwayat Hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
3. Fotokopi NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
4. Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. Fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang, diantaranya:
 - a. Fotokopi ijazah/sertifikat brevet pajak atau keahlian di bidang Kepabeanan/Cukai dari instansi/lembaga yang terakreditasi;
 - b. Fotokopi ijazah Sarjana di Bidang Administrasi Fiskal atau Diploma III (tiga) Pajak/Kepabeanan dan Cukai dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dalam menyelenggarakan pendidikan; atau
 - c. Fotokopi surat Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku untuk yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Pas photo terakhir pemohon berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan
8. Asli Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara sebaik-baiknya dan sebenarnya.

Demikian disampaikan agar maklum.

.....(8).....,.....(9).....

Pemohon

(10)

(.....(11).....)



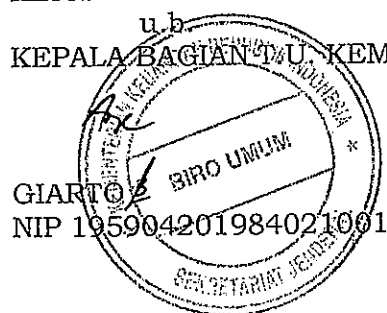
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi nama orang perserorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal lahir orang perserorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (3) : Diisi pendidikan terakhir orang perserorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (4) : Diisi alamat tempat tinggal orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (5) : Diisi nomor telepon orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (6) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (8) : Diisi nama kota tempat formulir permohonan dibuat
- Nomor (9) : Diisi tanggal formulir permohonan dibuat
- Nomor (10) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (11) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u b
KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN



GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 61 /PMK.01/2012
TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI
KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

FORMULIR
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap :(1).....
Tempat/tanggal lahir :(2).....
Alamat Rumah :(3).....
.....

Nomor Kartu Tanda Penduduk WNI :(4).....
Pendidikan Formal :1.(5).....
(Cantumkan Tahun Lulus 2.
dan Nama Pendidikannya) 3.
4.
5.
6.

Nomor Izin Konsultan Pajak :(6).....
.....

Pendidikan Brevet/PPJK :(7).....
(Cantumkan jenis Brevet/
Sertifikat, nomor, bulan dan tahun,
serta Lembaga yang menerbitkan
brevet/sertifikat)

Pekerjaan :(8).....
.....

Pengalaman Kerja :(9).....
.....
.....
.....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

.....(10).....,.....(11).....

(12)

(.....(13).....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DARTAR RIWAYAT HIDUP

- Nomor (1) : Diisi nama orang perserorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal lahir orang perserorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (3) : Diisi alamat tempat tinggal orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (4) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (5) : Diisi riwayat pendidikan formal orang perseorangan yang mengajukan permohonan dengan menyebutkan tahun lulus dan nama pendidikannya
- Nomor (6) : Diisi nomor izin konsultan pajak
- Nomor (7) : Diisi jenis Brevet/Sertifikat, nomor sertifikat, bulan dan tahun terbit sertifikat, serta lembaga yang menerbitkan brevet/sertifikat
- Nomor (8) : Diisi pekerjaan terakhir orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (9) : Diisi riwayat pengalaman kerja orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (10) : Diisi nama kota tempat formulir Daftar Riwayat Hidup dibuat
- Nomor (11) : Diisi tanggal Daftar Riwayat Hidup dibuat
- Nomor (12) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan
- Nomor (13) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Ar
GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 61 /PMK.01/2012
TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI
KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak dengan ini menyatakan untuk berkomitmen bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi dan Kolusi;
2. Dalam menjalankan tugas sebagai Kuasa Hukum, berjanji akan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam komitmen Kuasa Hukum ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan komitmen Kuasa Hukum ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

.....(1).....,.....(2).....

(3)

Meterai
Rp6.000,-

(.....(4).....)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

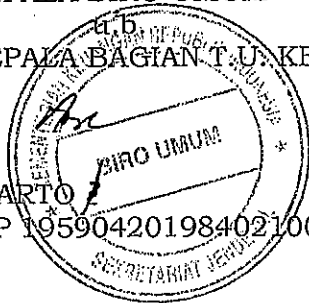
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : Diisi nama kota tempat surat pernyataan dibuat
Nomor (2) : Diisi tanggal surat pernyataan dibuat
Nomor (3) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (4) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

9 cm

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 61 /PMK.01/2012
TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI
KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

Tampak
Depan Kartu
Tanda
Pengenal



5,5
cm

Garis Tepi Kartu

9 cm

Tampak
Belakang
Kartu Tanda
Pengenal

IDENTITAS PEMEGANG TANDA PENGENAL KUASA HUKUM	
Tempat / Tanggal Lahir	:
Alamat	:
Keputusan Nomor	:
Berlaku sampai dengan	:
Jakarta, Sekretaris Pengadilan Pajak	

5,5
cm

Keterangan Gambar Kartu Tanda Pengenal (Kartu):

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Pas photo | : | Ukuran 2 X 3 cm (hitam putih atau berwarna). |
| Warna tulisan pada kartu | : | warna hitam. |
| Alamat | : | Sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP pemohon. |
| Keputusan Nomor | : | Diisi sesuai dengan nomor Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang berlaku. |
| Berlaku sampai dengan | : | Diisi sesuai dengan jangka waktu masa berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku. |
| Ukuran kartu | : | Panjang 9 (sembilan) cm x lebar 5,5 (lima koma lima) cm |
| Logo/lambang | : | Logo/lambang Pengadilan Pajak hanya tergambar ditengah permukaan Kartu Tanda Pengenal (tidak tergambar pada belakang Kartu Tanda Pengenal) |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**FORMULIR
PERMOHONAN PERPANJANGAN**

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 61 /PMK.01/2012
TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI
KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Di Jakarta

Perihal : **PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN MENJADI KUASA HUKUM PADA
PENGADILAN PAJAK**

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1).....
Tempat / tanggal lahir :(2).....
Pendidikan Terakhir :(3).....
Alamat Rumah :(4).....
Nomor Telepon/HP :(5).....
No. Kartu Tanda Penduduk :(6).....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :(7).....

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang terakhir;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. Fotocopi NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
6. Pas photo terakhir pemohon berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Demikian disampaikan agar maklum.

.....(8).....,.....(9).....

Pemohon

(10)

(.....(11).....)

m



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN

- Nomor (1) : Diisi nama orang perserorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal lahir orang perserorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (3) : Diisi pendidikan terakhir orang perserorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (4) : Diisi alamat tempat tinggal orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (5) : Diisi nomor telepon orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (6) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (8) : Diisi nama kota tempat formulir permohonan perpanjangan dibuat
- Nomor (9) : Diisi tanggal formulir permohonan perpanjangan dibuat
- Nomor (10) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
- Nomor (11) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO